

RELASI ANTAR ELITE EKONOMI dan ELITE PARTAI POLITIK

Ahmad Amiruddin Dosen

FISIP Universitas Sulawesi Barat, Majene, Indonesia

Email: ahmadamiruddintennang@gmail.com

ABSTRAK

Pelaksanaan pemilu yang dilaksanakan secara langsung di Indonesia, telah merubah arena kontestasi politik lokal di Indonesia. Hal ini dikarenakan berlakunya UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dalam sistem politik multi partai. Tentunya, pemilihan kepala daerah langsung tidak berarti memutus aktivitas politik para elite lokal. Karenanya, penelitian ini bermaksud untuk mengetahui pola relasi antar elite ekonomi/pengusaha dan elite partai politik, dan faktor-faktor yang mempengaruhinya pada pemilihan walikota di kota makassar Sulawesi selatan.

Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, karena bertujuan untuk mendeskripsikan, mencatat, dan menginterpretasikan aspek relasional daripada aktivitas politik elite ekonomi/pengusaha dan elite partai politik. Dengan demikian, teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap aktor personal dari kalangan elite ekonomi/pengusaha dan elite partai politik di Sulawesi selatan.

Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi pola relasi antar elite ekonomi/pengusaha dan elite partai politik pada pemilihan walikota di makassar, antara lain bermaksud melihat pola relasi yang mengelompok dan pola relasi yang menyebar. Relasi yang mengelompok terjadi pada sebagian kecil elite ekonomi, yaitu para keluarga, staf, karyawan dengan mengarahkan dukungannya ke kubu elite partai politik yang mengusung Tamsil Linrung atau Irman YL. Sedangkan pola relasi yang menyebar terjadi pada setiap lapisan elite ekonomi, mulai dari lapisan teratas sampai yang terendah dengan mengarahkan dukungannya ke setiap kubu elite partai politik yang ada di Kota Makassar. Hal tersebut ditunjukkan oleh adanya bentuk-bentuk dukungan elite ekonomi seperti; konsultasi, fasilitasi, dan bantuan dana, dukungan jaringan terhadap elite partai politik yang memberikan kompensasi dalam bentuk jaminan keamanan bisnis, akomodasi kepentingan bisnis, dan akomodasi dalam partai. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi relasi antar elite ekonomi dan elite partai politik adalah adanya proses kalkulasi rasional terhadap kepentingan individu para elite lokal dan adanya jaringan interaksi antar elite lokal yang berbasis pada organisasi kemasyarakatan.

Fakta tersebut dapat dijadikan penjelas bahwa, elite ekonomi/pengusaha memang tidak bergerak dalam ruang yang hampa dari aktivitas politik praktis. Eksistensi elite ekonomi dan elite partai politik ditengah-tengah kuatnya pengaruh tradisionalisme organisasi kemasyarakatan menyebabkan terciptanya pola relasional yang dinamis dan menyebar dalam sistem politik multi partai. Dilain pihak, pemilihan kepala daerah secara langsung, semestinya dijauhkan dari adanya kecenderungan money politik.

Kata kunci

Pilkada, Elit, partai Politik

ABSTRACT

The implementation of elections which are carried out directly in Indonesia has changed the arena of local political contestation in Indonesia. This is due to the enactment of Law No. 32 of 2004 concerning Regional Government in a multi-party political system. Of course, direct election of regional heads does not mean ending the political activities of local elites. Therefore, this study intends to find out the pattern of relations between the economic/entrepreneurial elite and the political party elite, and the factors that influence it in the mayoral election in the city of Makassar, South Sulawesi.

The approach used in this study is a qualitative descriptive method, because it aims to describe, record, and interpret the relational aspects of the political activities of the economic/business elite and political party elites. Thus, data collection techniques were carried out through interviews, observation, and documentation of personal actors from among the economic/business elite and political party elites in South Sulawesi.

This study aims to identify the pattern of relations between the economic/entrepreneurial elite and the political party elite in the mayoral election in Makassar. Clustered relations occur in a small part of the economic elite, namely families, staff, employees by directing their support to the elite camp of political parties that carry Tamsil Linrung or Irman YL. While the pattern of relations that spreads occurs in every layer of the economic elite, starting from the top layer to the lowest by directing its support to every political party elite stronghold in Makassar City. This is shown by the existence of forms of support from the economic elite such as; consultation, facilitation, and financial assistance, network support for political party elites that provide compensation in the form of guarantees for business security, accommodation for business interests, and accommodation within the party. The factors that influence the relationship between economic elites and political party elites are the process of rational calculation of the individual interests of local elites and the existence of interaction networks between local elites based on social organizations.

This fact can be used as an explanation that the economic/entrepreneurial elite does not operate in a vacuum of practical political activity. The existence of economic elites and political party elites amidst the strong influence of social organization traditionalism has led to the creation of a dynamic relational pattern that spreads in a multi-party political system. On the other hand, the direct election of regional heads should be kept away from the tendency of money politics.

Keywords

Local Head Election, elite, political party

Pendahuluan

Perubahan system politik di Indonesia terutama terkait politik desentralisasi terhadap penguatan hak dan partisipasi masyarakat lokal

membawa perubahan pola relasi kekuasaan pada dua level sekaligus yaitu antara pemerintah pusat dan daerah, dan antara eksekutif dan legislatif daerah. Seiring dengan itu, perubahan-perubahan dalam praktik politik desentralisasi di Indonesia juga melahirkan berbagai persoalan-persoalan baru.

Politik desentralisasi, khususnya di Indonesia, dapat kita lihat dalam hal partisipasi politik.¹ Membicarakan partisipasi politik tidak mungkin melepaskan unsur aktor. Dengan kata lain, siapa sebenarnya yang harus berpartisipasi. Dari dimensi teoritis, persoalan 'siapa' tidak pernah mendapatkan penjelasan yang tuntas, dan dari dimensi empiris, selalu menghadirkan perseteruan klasik tentang relasi antar aktor. Dengan demikian, persoalan partisipasi politik diperhadapkan pada situasi yang rumit untuk memahami relasi antar aktor, dalam dua ranah sekaligus, yaitu teoritis dan empiris.

Persoalan tersebut semakin rumit untuk dijelaskan, tatkala terjadi perluasan partisipasi politik di aras lokal. Baik dalam arti ruang maupun aktor - aktor yang terlibat. Secara sederhana perluasan ruang partisipasi dapat dipahami sebagai terciptanya kesempatan baru sebagai akses dari perubahan bentuk partisipasi politik dari model tidak langsung (*in -direct*) yang elitis ke model langsung (*direct*) yang populis. Akses ikutannya bergerak ke arah perluasan aktor, dari segelintir elite di lembaga perwakilan daerah ke warga negara. Tentunya di tengah-tengah warga negara terdapat juga kelompok elite lainnya seperti, elite ekonomi atau pengusaha. Lantas muncul 'teka-teki politik' yang sangat menarik untuk diperiksa. Bagaimana aktor-aktor tersebut saling berhubungan satu sama lainnya?

Untuk itu, penjelasan tentang pola relasi elite partai politik dan elite ekonomi dalam proses aksi pemilihan kepala daerah langsung, merupakan salah satu tema kajian yang menarik untuk dikemukakan. Mengapa elite ekonomi/pengusaha, dan mengapa pula pemilihan kepala daerah langsung menarik untuk melihat relasinya dengan elite partai politik?

Asumsi terhadap elite ekonomi/pengusaha mewakili dua dimensi persoalan tersebut di atas, yaitu dimensi ruang dan dimensi aktor. Dari dimensi ruang partisipasi, elite ekonomi/pengusaha, sebagaimana halnya dengan warga negara lainnya, mendapatkan porsi pencahayaan yang setimpal dengan meredupnya cahaya proyek politik elite partai. Kesempatan berpolitik praktis dalam diri elite ekonomi/pengusaha diperkuat oleh proyeksi pencahayaan dalam simbol hak politiknya sebagai warganegara dan status individualnya sebagai orang yang berpengaruh.

Porsi yang diberikan dan melekat pada diri seorang elite ekonomi/pengusaha menciptakan efek reflektis dalam arena politik, yang dengan sendirinya menjadikannya sebagai aktor utama yang berdampingan dengan elite partai politik. Disinilah inti persoalannya, dalam pengertian, terjadi pergeseran dari model proyeksi ke munculnya kesempatan (dimensi ruang partisipasi), yang

¹ Salah satu persoalan yang banyak menyita perhatian adalah relasi antara elite birokrasi dan partai politik. Khususnya dalam perkembangan politik lokal beberapa tahun terakhir ini.

selanjutnya menyembulkan aktor baru (dimensi aktor), yaitu elite ekonomi/pengusaha lokal yang berdampingan dengan elite partai politik. Lantas, bagaimana relasi antar aktor utama tersebut selanjutnya? Untuk itu pemeriksaan terhadapnya menjadi semakin mengasyikkan.

Kajian ini menjadi penting mengingat agenda pemilihan kepala daerah bukan hanya isu yang bersifat lokalitas semata, melainkan mencuat sebagai 'agenda nasional'.² Sesuatu yang baru umumnya menyedot perhatian besar. Karenanya, pemilihan walikota yang dilaksanakan secara langsung di Kota Makassar 2018 menarik untuk dieksplorasi lebih jauh. Terutama dari sisi proses, yang didalamnya melibatkan pergumulan aktor-aktor utama dari kalangan elite ekonomi/pengusaha dan elite partai politik secara langsung, dalam bingkai pemilihan kepala daerah secara langsung.

Pada pemilihan walikota Makassar 2018 misalnya, terlihat bahwa relasi elite ekonomi/pengusaha dengan elite partai politik dimana, partisipasi elite ekonomi/pengusaha dalam membantu dan memobilisasi massa dan mengarahkan dukungannya terhadap kandidat yang diusung oleh partai. Oleh karena itu, pemeriksaan terhadap pola relasi antar elite ekonomi/pengusaha dan elite partai politik pada pemilihan walikota Makassar menarik untuk dicermati bagaimana kedua elit ini berelasi.

Jika dilihat dari sisi peta kekuatan partai-partai politik, dan kekuatan kandidat yang berkontestasi di walikota Makassar dapat dilihat bahwa sebagian besar kontestan didominasi oleh partai-partai lama dan tokoh-tokoh lokal yang sangat berpengaruh. Kemenangan Partai Demokrat atau kandidat yang diusung oleh partai Demokrat tidak terlepas dari aktivitas politik elite ekonomi/pengusaha dan jaringannya melalui jalur pembentukan organisasi non-formal seperti anggota REI, HIPMI, HIPMI-PT

Method / Metode

Penelitian ini melihat pada pola relasi antar elit politik, Elite dapat dipahami sebagai posisi di dalam puncak struktur-struktur sosial yang terpenting, seperti dalam bidang ekonomi, pemerintahan, aparat kemiliteran, politik, agama, pendidikan dan pekerjaan-pekerjaan bebas.³ Dengan pemahaman ini maka, elite merupakan seseorang atau sekelompok orang yang mempunyai keunggulan tertentu, dimana dengan keunggulan yang melekat pada dirinya, yang bersangkutan dapat menjalankan peran yang menonjol dan berpengaruh pada cabang kehidupan tertentu. Sifat kemononjolan atau keunggulan yang melekat pada diri pribadi seseorang atau sekelompok orang itulah yang mengantarkannya menempati posisi puncak dalam struktur sosial.

² Dalam putaran pertama terhitung mulai bulan Juni 2005 tidak kurang dari 11 Propinsi, 179 Kabupaten dan 36 Kota akan menggelar pemilihan kepala daerah/wakil kepala daerah secara langsung. <http://www.mediaindo.co.id/>, Selasa, 01 Maret 2005

³ Lipset dan Solari dalam Haryanto, 2005, *Kekuasaan Elite, suatu bahasan pengantar*, JIP -PLOD UGM, Yogyakarta, hal.68

Ketika seseorang mempunyai keunggulan tertentu yang tidak terdapat pada orang lain dan yang bersangkutan menempati posisi puncak dalam struktur social yang mengitarinya, maka orang tersebut (elite) mempunyai kesempatan yang lebih luas untuk menjalankan kontrol sosial dalam suatu mekanisme politik. Setidaknya terdapat tiga jenis mekanisme politik dalam menjalankan kontrol sosial, antara lain; melalui pengaruh, kekuasaan, dan kewenangan.⁴ Pengaruh adalah proses dimana perilaku, keputusan, atau saran dari satu atau lebih orang akan diikuti atau ditiru oleh orang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau sekelompok orang untuk mengendalikan orang lain, atau bahkan memadamkan usaha menentangnya. Sementara itu, yang dimaksud dengan kewenangan adalah teknologi kekuasaan dalam bentuk aturan formal yang mendapat pembenaran atau rasionalisasi sebagai hak moral dan dianggap patut oleh masyarakat sendiri.

Penelitian ini dilakukan di kota Makassar dengan metode kualitatif untuk melihat pola relasi elit.

Hasil dan Pembahasan

Relasi elite Ekonomi/Pengusaha dan elite Partai Politik

Menjelaskan relasi antara elite ekonomi, pengusaha dan elite partai politik merupakan hal yang krusial untuk dipahami karena secara prinsip keduanya selalu menghadirkan karakter yang saling menegasikan. Secara prinsip, nilai-nilai dasar yang menjadi ciri dari birokrasi merupakan antitesa dari semangat demokrasi itu sendiri. Sementara dalam demokrasi, pilar utama yang dikehendaki adalah partai politik. Tentang hal tersebut, Etzioni-Halevy (1983) mengemukakan bahwa “dilematika yang dihadapi birokrasi menjadi sumber hambatan, friksi, dan konflik dalam arena politik (*the bureaucratic dilemma and political friction*)”. Sepanjang arena politik diinterpretasikan sebagai soal perebutan kekuasaan, maka aktivitas elite birokrasi sesungguhnya sudah menempati area yang sangat mudah untuk saling memasuki dengan elite partai politik. Tepat pada titik inilah relasi antara elite birokrasi dan elite partai politik berpotensi terbentuk. Untuk itu, Barbara Geddes (1993) mengemukakan bahwa “elite birokrasi dan elite partai politik menciptakan pola relasi tertentu agar kompetensi yang dimiliki oleh birokrasi dapat memobilisasi dukungan yang memadai bagi pimpinan politik atau eksekutif”. Dalam hal ini, kompetensi birokrasi dipergunakan oleh kelompok elite-birokrasi dan partai politik- untuk memobilisasi dukungan sekaligus menciptakan peluang optimalisasi kepentingan mempertahankan eksistensi masing masing (*current survival*), pemerintahan yang efektif (*effective government*), dan terbentuknya organisasi politik dengan ke setiaan personal yang tinggi dalam jajaran eksekutif (*creation of loyal machine*). Ketiga aspek tersebut dapat dipergunakan untuk melihat pola relasi antara elite birokrasi dan

⁴ Periksa Stephen K. Sanderson, 2003, *Makro Sosiologi, sebuah pendekatan terhadap realitas sosial* (edisi kedua), terj. Farid Wajidi dan S. Menno, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 295-297

elite partai politik terutama yang berkaitan dengan *posting* pejabat birokrasi ketika arena politik tengah berlangsung.

Namun demikian, pola relasi antar elite pada ranah birokrasi dan partai politik dalam pemerintahan modern membutuhkan suatu pengelolaan yang sistematis. Ada dua pola relasi sebagai alternatif solusi yang utama, *pertama* birokrasi berkedudukan sebagai sub-ordinasi dari politik (*executive ascendancy*), *kedua* birokrasi sejajar dengan politik (*bureaucratic sublation* atau *attempt at coequality with the executive*). Pola relasi yang menghendaki birokrasi sebagai sub-ordinasi dari politik (*executive ascendancy*) diturunkan dari suatu pandangan bahwa supremasi pejabat publik diperoleh dari mandat yang diberikan oleh Tuhan atau rakyat atau dari organisasi-organisasi publik lainnya. Dengan kata lain, legitimasi kekuasaan pejabat publik tergantung pada sistem pemerintahan yang dianut suatu negara. Karenanya, dominasi kepemimpinan pejabat politik atas birokrasi mengharuskan pemisahan secara tegas antara fungsi politik dan fungsi administrasi.

Sedangkan pola relasi yang menghendaki birokrasi sejajar dengan politik diturunkan dari anggapan bahwa birokrasi tidak hanya berfungsi sebagai mesin pelaksana melainkan sebanding dengan partai politik karena birokrasi mempunyai basis kekuasaan tersendiri selain kekuasaan yang dilimpahkan oleh pejabat politik. Sebagai sebuah elemen dari organisasi negara, keberadaan birokrasi dipandang sebagai faktor penting yang patut dipertimbangkan dalam proses sirkulasi elite. Robert Michels berpendapat bahwa “naluri pertahanan jaringan kekuatan kelas-kelas yang secara politik dominan untuk mencapai dominasi serta tetap memegang kemudi, menempatkan birokrasi sebagai lahan baru untuk keberlangsungan perjuangan mereka dalam posisi sosial yang lebih menjanjikan. Permintaan dari kelas-kelas sosial yang secara politik dominan, senantiasa melahirkan kelompok elite yang secara simultan menjadi penggerak terbukanya bendungan saluran-saluran birokrasi ke dalam jabatan-jabatan yang menjadi benteng pertahanan yang tangguh”.

Pendapat tokoh yang populer dengan konsep hukum besi oligarkhi dalam arena politik ini patut direnungkan. Perlu diingat, bahwa jaringan kekuatan-kekuatan politik dapat bersumber dari manapun. Dia bisa datang dari partai politik, kelompok kepentingan, kelompok penekan, atau bahkan juga dari birokrasi. Sementara sudah menjadi tema sentral sekaligus semacam kesepakatan bahwa jaringan kekuatan politik akan bermuara pada satu kata kunci utama yaitu ‘kekuasaan’.

1. Faktor dominan yang mempengaruhi relasi elite birokrasi dan a. partai politik.

Baik birokrasi maupun partai politik sama-sama memiliki pengaruh terhadap setiap proses politik. Birokrasi melalui sistem, mekanisme, dan orang-orangnya (birokrat) sebagai pelaksana kebijaksanaan dan partai politik melalui wakil-wakilnya dalam parlemen sebagai pembuat kebijaksanaan. Dengan demikian, aktivitas kedua lembaga tersebut tidak dapat dilepaskan dari aktivitas

orang-orang yang berada didalamnya. Oleh karena itu, faktor-faktor dominan yang menghubungkan aktivitas antar elite birokrasi dan elite partai politik menjadi penting untuk diklarifikasi. Terdapat beberapa faktor-faktor dominan yang mempengaruhi relasi antara elite birokrasi dan partai politik, antara lain :

a. Kalkulasi pilihan rasional

Salah satu isu utama perdebatan literatur tentang tindakan aktor dalam arena politik adalah menyangkut persoalan rasionalitas. Sementara kata 'rasional' sendiri merupakan kosakata yang sulit untuk dipahami, dan sangat tergantung pada pendekatan yang dipergunakan. Seperti Weber, misalnya, membedakan rasionalitas atas nilai dan tujuan. Rasionalitas nilai merupakan orientasi aksi berdasarkan nilai/norma, dan rasionalitas tujuan merupakan orientasi keputusan dan aksi berdasarkan kesesuaiannya dengan tujuan akhir. Lain lagi pendapat Chater *et al.*, yang membedakan rasionalitas kalkulasi dan rasionalitas deskriptif.

Rasionalitas kalkulasi merupakan proses berfikir yang menggunakan metode tertentu secara logis dalam proses pengambilan keputusan, dan rasionalitas deskriptif merupakan tindakan yang mendekati standar rasionalitas kalkulasi. Namun demikian, setidaknya unsur utama rasionalitas adalah kesesuaian antara tindakan seorang actor (elite) dengan kepentingannya. Sehingga pertimbangan utamanya adalah maksimalisasi tercapainya kepentingan aktor melalui serangkaian tindakan terlepas apakah sesuai dengan norma atau nilai-nilai tertentu.

Disini, pendekatan *rational choice theory* menjadi penting artinya untuk menganalisa tindakan aktor (elite) dalam proses politik. Dalam *rational choice theory* penentuan pilihan didasarkan atas pertimbangan yang paling rasional diantara berbagai alternatif-alternatif yang ada. Karenanya, pendekatan ini menekankan pada level aktor personal sebagai basis analisa. Asumsinya adalah meskipun dalam arena politik terdapat kepentingan yang sama pada tatarankelompok, akan tetapi individu-individu yang ada didalamnya mempunyai motivasi dan kepentingan yang bisa berbeda-beda. Implikasinya adalah belum tentu individu-individu tersebut mengambil bagian dalam tindakan bersama, sehingga terdapat kemungkinan terjadinya fragmentasi pola-pola relasi yang dipilihnya.

Dalam kerangka pilihan rasional (*rational choice*) lahirnya relasi antara elite birokrasi dan elite partai politik lebih didorong oleh pertimbangan untuk mempertahankan eksistensi masing-masing pihak. Pertimbangan tersebut hadir sebagaimana dikutip Firmansah, *Menyoal rasionalitas pemilih* ketika setiap aktor dalam kelompok elite mempunyai tujuan-tujuan khusus dan akan mempergunakan cara yang efektif untuk memperoleh capaian politiknya. Dalam hal tersebut elite birokrasi ataupun elite partai politik berada pada posisi yang tidak jelas, kemana akan mengarahkan loyalitas dan dukungannya. Karena itu, mereka lebih bebas menentukan pilihan-pilihannya berdasarkan pertimbangan keuntungan yang lebih bisa dikalkulasikan. Dan karena setiap elite mempunyai kesempatan yang relatif sama, maka pola yang sama akan mereka pergunakan

untuk mengoptimalkan kepentingan-kepentingannya, dengan atau tanpa terikat oleh pilihan-pilihan elite sebelumnya.

Kecenderungan umum dalam suatu arena politik adalah setiap aktor akan mengupayakan keputusan yang terbaik bagi dirinya, namun jika tidak ada pilihan yang terbaik maka mereka membuat kesepakatan mengenai suatu pilihan tertentu. Dalam kesepakatan tersebut masing-masing aktor harus bersedia berkorban untuk menghindari terjadinya konflik yang merusak. Asumsinya adalah bila terdapat pertentangan di antara mereka maka akan terdapat dua kemungkinan. *Pertama*, bertahan pada pendirian masing-masing dengan kesediaan untuk menerima kegagalan. *Kedua*, jika salah satu pihak mengalah, maka pihak tersebut memberikan pengorbanannya kepada pihak lawannya.

Hal tersebut sangat sulit dan jarang terjadi dalam arena politik. Maka salah satu solusinya adalah masing-masing pihak mengurangi tuntutan pada sisi untuk mendapatkan keuntungan pada sisi yang lainnya. Pendeknya, setiap elite menentukan pilihan-pilihan tertentu setelah membuat alternatif dan menghitung secara rasional konsekuensi-konsekuensi dari masing-masing alternatif yang ada. Alternatif yang dipilih adalah opsi yang dapat memaksimalkan kepentingan pribadinya. Salah satu caranya adalah melakukan relasi-relasi tertentu, namun murni sebagai strategi untuk bertahan atau mendapatkan akses terhadap kekuasaan, sehingga motivasi dasar yang berada dibalik tindakan-tindakannya dapat tercapai.

Dalam konteks pemilihan kepala daerah langsung di tengah-tengah system multi partai, setiap aktor dihadapkan pada sebuah realitas politik dengan berbagai alternatif pilihan. Dengan demikian, perubahan mekanisme dan sistem pemilihan kepala daerah di Indonesia dengan sendirinya dapat merubah pola relasi antar aktor yang didalamnya termasuk elite birokrasi dan elite partai politik. Tentunya strategi pilihan rasional membuka peluang bagi munculnya kelompok elite baru, dan dalam skala tertentu berarti juga memunculkan friksi dalam arena politik. Tegasnya, faktor-faktor yang berpengaruh terhadap relasi elite birokrasi dan elite partai politik dalam suatu arena politik ditentukan oleh kepentingan mempertahankan eksistensi, dan tersedianya berbagai alternatif pilihan yang paling rasional bagi masing-masing pihak.

b. Network

Pendekatan *network* berangkat dari kecenderungan ‘liberalisasi kelembagaan pemerintahan’ sebagai implikasi dari pengembangan mekanisme *check -balances* dan mobilisasi perubahan yang terjadi diberbagai aspek. Isu utamanya adalah hubungan kooperatif atukah non-kooperatif antar aktor yang saling tergantung (*interdependent parties*), yang dalam skala tertentu mempunyai berbagai macam pemikiran, kepentingan, dan strategi yang sering kali saling bertentangan. Setidaknya terdapat dua faktor pemicu terbentuknya suatu jaringan (*network*) dengan melibatkan sejumlah aktor seperti elite birokrasi, struktur bawah birokrasi, pengusaha, dan partai politik.

Faktor pemicu tersebut adalah kepentingan dan informasi. Relasi antar elite birokrasi dan elite partai politik dapat terbentuk ketika salah satunya bertindak sebagai penyedia ataupun pengguna informasi dan kepentingan tertentu. Karenanya, tawar menawar informasi dan kepentingan berpengaruh terhadap munculnya pola relasi tertentu.

Dengan demikian keberadaan berbagai pilihan tindakan rasional yang akan diambil oleh kelompok elite -baik dalam ranah birokrasi maupun partai politik dalam suatu arena politik dapat membuka peluang pencapaian kepentingan kepentingannya secara optimal. Karena itu, mereka memerlukan suatu instrument penyaluran tindakan melalui jaringan-jaringan tertentu. Atau dengan kata lain sumberdaya informasi dan kepentingan-kepentingan elite birokrasi dan elite partai penjelasan panjang lebar tentang Teori Network disampaikan oleh Pratikno, politik memerlukan wadah/media sebagai basis jaringan interaksi antar mereka. Hal inilah yang dapat menentukan pola relasi antar elite terbentuk.

2. Arena Pemilihan Kepala Daerah

Salah satu perubahan mendasar akibat pemberlakuan UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah adalah perubahan sistem pemilihan kepala daerah (*electoral system*) dari pemilihan tidak langsung (*indirect voting*) ke system pemilihan langsung oleh rakyat (*direct voting*). Implikasi dari perubahan system pemilihan tersebut dapat dilihat dalam tiga hal. *Pertama*, posisi kunci dalam pemilihan kepala daerah yang sebelumnya menjadi wilayah kaplingan lembaga legislatif (partai politik) kini bergeser kepada masyarakat sebagai pemilih. Partai politik hanya berperan sebagai pengusul kandidat. Konsekuensinya, partai politik harus mengembangkan pola-pola baru dalam meraih dukungan sebanyak mungkin dari segenap komponen masyarakat pemilih dan lembaga -lembaga sosial lainnya (yang tentunya juga berharap dukungan datang dari pihak elite birokrasi) agar kandidat yang diajukannya meraih kemenangan. *Kedua*, partai politik yang pada tataran teoritik berfungsi sebagai *aggregator* dan *articulator* aspirasi publik tidak sepenuhnya tercermin dalam mekanisme pemilihan langsung.

Hal ini berarti terdapat berbagai kepentingan yang belum tentu sama bagi setiap aktor yang terlibat dalam pemilihan kepala daerah. Jadi, partai politik bukan satu-satunya alat untuk memobilisasi massa. Untuk itu, dibutuhkan alternatif saluran-saluran mobilisasi massa baik pada level individu maupun institusi. refleksi mutakhir dapat dilihat dalam pemilihan umum tahun 2018, yaitu partai politik pemenang pemilihan umum legislatif tidak serta merta mengantarkan kandidat yang diusungnya sebagai pemenang dalam pemilihan presiden yang juga dilaksanakan secara langsung. *Ketiga*, dinamika politik pada level nasional seringkali dipahami sebagai cerminan dari dinamika politik lokal. Akan tetapi, berdasarkan pengalaman-pengalaman empiris yang selama ini banyak mewarnai temuan-temuan hasil penelitian seringkali fakta-fakta yang kita

baca dalam level politik nasional tidak dapat dioperasionalkan bahkan gagal dalam menjelaskan dinamika politik lokal.

Hal ini terutama sekali disebabkan oleh paradoks penyeragaman system politik nasional dengan realitas politik lokal yang beragam pada masing-masing daerah. Atau dengan kata lain instrumen kebijakan politik yang diberlakukan secara seragam dan nasional akan mengalami impotensi ketika dipergunakan untuk menjelaskan/mempermak dinamika politik lokal, jika tidak disertai dengan pemahaman yang komprehensif tentang kekhasan proses politik yang berlangsung di aras lokal.

Pendeknya, perubahan sistem pemilihan kepala daerah sebagaimana yang tertuang dalam UU No. 32 Tahun 2004 menyoal masalah cara atau metode dalam pelaksanaan rekrutmen pejabat politik atau publik yang legitimate. Dilihat dari cara atau metode yang dipergunakan dalam rekrutmen pejabat politik atau publik, system pemilihan kepala daerah dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu system pemilihan tidak langsung (*indirect voting*) dan sistem pemilihan langsung (*direct voting*). Perbedaan substansial diantara kedua metode tersebut terletak pada bagaimana kedaulatan rakyat diletakkan dalam kerangka sistem.

Conclusion / Kesimpulan

Relasi dari pengusaha dan partai politik adalah hal yang lumrah terjadi. Hal tersebut, dianggap sesuatu yang sangat rasional. Relasi antar kedua elit adalah hal yang penting untuk saling mensukseskan setiap konstelasi politik, kehadiran pemodal dalam pemilu sangat krusial untuk menopang baktifitas partai dan relit, begitupun sebaliknya elit ekonomi membutuhkan elit politik mengamankan kebijakan kebijakan politis yang tentu mneguntungkan antar kedua actor.

Karena politik memerlukan uang sebagai kekuatan sekaligus pelicin jalannya organisasi partai politik dengan segala aktivitasnya. Boleh dikatakan semua serba uang atau pasti harus ada uang agar kegiatan bisa berjalan. Dengan kata lain biaya politik itu besar. Mungkinkah pengusaha yang sudah terjun di politik atau menjadi pejabat.

Pada dasarnya fenomena pengusaha menjadi pejabat dan berelasi dengan pejabat partai politik. Pengusaha sebagai warga negara biasa wajar mempunyai hak-hak politik termasuk terjun dan aktif di partai politik. Juga merupakan hal yang wajar dan malah seharusnya mereka yang sudah sukses berbisnis juga memikirkan persoalan-persoalan yang lebih besar dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Tidak perlu ada yang dikhawatirkan ketika semua itu berjalan secara transparan dan berimbang sehingga demokrasi tetap berjalan secara fair dan sehat. Justru itulah yang masih diperdebatkan. Apakah benar demokrasi itu bisa sehat kalau politik uang menjadi alat paling efektif. Namun sebaliknya bisa juga dipertanyakan, apakah mungkin politik dan kekuasaan itu bisa dipisahkan dari uang. Demokrasi membutuhkan elite partai politik, dan para politisi, yang jujur dan dapat diterima disegala ruang, tidak sekadar memanfaatkan momentum pemilu untuk meraih kekuasaan dan kepentingan

sesaat, juga melainkan mengakomodasi aspirasi rakyat, dan menjalankan kekuasaan demi kepentingan rakyat. Namun Elite (pengusaha) di partai kerap mempertontonkan logika dan cara kerja sesuai dengan kepentingannya. Pengusaha dan partai politik masih suka bekerja di ruang yang terpisah dalam kedap suara dengan para pemilihnya.

References / Referensi

- Amirudin, A. Zaini Bisri. (2006), *Pilkada Langsung Problem dan prospek Sketsa Singkat Perjalanan Pilkada*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Arif, Saiful. (2003). *Ilusi Demokrasi*, Jakarta, Desantara Utama.
- Fukuyama, Francis. (2005). *Memperkuat negara Tata Pemerintahan dan Tata Dunia Abad 21*, Jakarta, Gramedia, Pustaka Utama.
- Eko, Sutoro, Yunanto. (2005). *Krisis Demokrasi Elektorat*, dalam *Demokrasi dan Potret Lokal Pemilu Salatiga*, Pustaka Pelajar.
- Hadiz, R. Vedi., (2005). *Dinamika Kekuasaan Ekonomi Politik Indonesia Pasca Soeharto*, Jakarta, LP3ES.
- Muhaimin, Yahya. (1988) *Kebijaksanaan Ekonomi dan Klientelisme*, Yogyakarta, Pusat Antar Universitas-Studi Sosial Universitas Gadjah Mada.
- Kunio, Yoshihara. September, 1999, *Kapitalisme Semu Asia Tenggara*, Jakarta, LP3ES
- Nadir, Ahmad, (2005). *Pilkada Langsung dan Masa Depan Demokrasi Indonesia*, Malang, Avveroes Press.
- Rifai, Amzulian. (2003). *Politik uang dalam pemilihan kepala daerah*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Santoso, Yudi, (2003). *Diskursus Niccolo Machiavelli*. Terjemahan: the discourses the modern library, New York, Yogyakarta: Bentang Budaya.
- Schmandt, Hendri J. (2002). *Filsafat Politik (Terjemahan Kajian Historis dari zaman Yunani Kuno sampai zaman Modern)*, Ahmad Baidlowi, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Berg, B. L. & Lune, H. (2012). *Qualitative Research Methods For Social Sciences*. Boston and New York: Pearson Education
- Krasner, S. D. (1976). *State Power and the Structure of International Trade*. *World Politics: A Quarterly Journal of International Relations*, 28(3), 317–347. <http://doi.org/10.2307/2009974>